DALAM PILKADA DI SLEMAN

Masyarakat Harus Cerdas

SLEMAN (KR) - Pilkada tinggal menghitung hari. Masyarakat harus lebih cerdas dalam menentukan pilihan, yakni pasangan calon yang memanfaatkan jaringan atau bitingan.

Ketua Fraksi PPP-NasDem Untung Basuki Rahmad mengatakan, Pilkada ini untuk menentukan nasib Pemkab Sleman lima tahun ke depan. Untuk itu, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. "Memilih yang memanfaatkan jaringan atau hanya dengan bitingan," katanya, Rabu (13/11).

Diterangkan Untung, ketika masyarakat yang memilih pasangan calon yang memanfaatkan jaringan itu akan ada pemberdayaan. Selain itu, jaringan juga akan ikut mengawal kebijakan dari pemerintah. "Bahkan nantinya pasti akan ada keterlibatan untuk mengawal kebijakan," ujarnya.

Sedangkan jika pasangan yang memanfaatkan bitingan, tentu akan hanya nuansa kepentingan. "Itu bedanya dengan jaringan," ucap politisi PPP ini.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Golkar Banudoyo Manggolo. Menurutnya, dalam menentukan pilihan, masyarakat harus melihat *track record* pasangan. Mengingat hal itu sangat menentukan cara kerja dalam lima tahun mendatang.

"Kalau selama ini kerjanya baik, tentu kedepan akan baik. Tapi kalau kinerjanya selama ini kurang baik, pasti nantinya akan terbawa saat memimpin lima tahun ke depan," tegas Banudoyo. **(Sni)-f**

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Optimalisasi Pengawasan di Bidang Pemerintahan

KR-Istimewa

Guntur Yoga Purnawan ST

SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD Kabupaten Sleman akan memaksimalkan ketugasan mitra kerjanya, khususnya di bidang pemerintahan. Selain itu juga akan mengoptimalkan pengawasan terhadap dinas agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Sleman Guntur Yoga Purnawan ST mengatakan, akan menjalin kerja sama yang baik dengan semua mitra kerja Komisi A. Kerja sama itu bertujuan memaksimalkan fungsi mitra Komisi A untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Semua dinas yang menjadi mitra kami akan jadi prioritas Komisi A. Semua dinas yang jadi mitra kerja akan kami maksimalkan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan prima ke masyarakat," kata Guntur.

Sebagaimana diketahui, ruang lingkup bidang pemerintahan, antara lain, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi serta kependudukan dan catatan sipil. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, perpustakaan, kearsipan, pemerintahan umum, perizinan dan penanaman modal, kepegawaian dan diklat, serta kesatuan bangsa dan politik. "Kami ingin memastikan jalannya pemerintahan harus *on the track* dan sesuai aturan yang berlaku," tegas politisi dari Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi A lainnya Yani Fathurahman SPdI menambahkan, Pemkab Sleman sudah memiliki mal perizinan. Keberadaan mal perizinan itu harus dimanfaatkan secara optimal agar proses perizinan di Sleman menjadi lebih profesional. "Proses perizinan yang sudah baik harus terus ditingkatkan. Kalau ada yang masih kurang harus diperbaiki. Harapan kami proses perizinan ini menjadi lebih profesional," katanya.

KR-Istimewa

Komisi A saat melakukan rapat pembentukan alat kelengkapan (alkap).

Proses perizinan, lanjut Yani, sampai saat ini masih menjadi keluhan masyarakat yang mengaku masih sulit dan ribet untuk mengurus izin. Tentu keluhan masyarakat itu harus segera direspons oleh pemerintah daerah. "Segala bentuk keluhan, harus segera ditindaklanjuti untuk mengetahui duduk perkaranya. Supaya pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," terang Ketua Fraksi PKS ini.

Namun dalam mengeluarkan izin, Yani meminta kepada dinas terkait untuk lebih berhati-hati dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan harapan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. "Kita tidak anti investasi. Tapi memberikan izin harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai izin yang dikeluarkan justru bertentangan dengan aturan," imbaunya.

Di samping perizinan, Yani juga menyoroti tentang literasi masyarakat. Sekarang ini angka tingkat literasi masyarakat cukup rendah. Untuk itu perlu dikembangkan perpustakaan di kalurahan-kalurahan hingga padukuhan. "Angka tingkat literasi anak-anak muda sekarang ini cukup lemah. Untuk itu literasi digital ini perlu digalakkan. Bahkan kalau perlu, memperbanyak perpustakaan di tingkat kalurahan dan padukuhan," pinta warga Wukirsari Cangkringan ini. **(Sni)-f**

KR-Istimewa

Yani Fathurahman SpdI